



**PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT OLEH DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

FIQRA ASIDIQQI
NIM.11720714789

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pelayanan Yang Sama Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kampar”** yang ditulis oleh:

Nama : FIQRA ASIDIQQI

NIM : 11720714789

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16/07 1442 H
2021 M

Pembimbing Skripsi

H.MHD.KASTULANI, SH.,MH
NIP. 196309091990021001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP MASYRAKAT OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN" yang ditulis oleh:

Nama : FIQRA ASIDIQIQI
NIM : 11720714789
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris
Musrifah, SH., MH

Penguji I
Lovelly Dwina Dahan, SH., MH

Penguji II
H. MHD. Kastulani, SH., MH



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 2005011 005

ABSTRAK

Figra Asidiqqi, (2021): Pelaksanaan Pelayanan terhadap Masyarakat Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia di dalam bidang administarsi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang professional. Di dalam Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administarsi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi bertujuan untuk: a) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa, kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, b) Memberikan perlindungan hak sipil penduduk, c) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkat secara akurat, muktahir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembanguna pada umumnya, d) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dana terpadu, e) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pengurusan dokumen Kependudukan dilakukan dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa penting kependudukan dan pendaftaran penduduk, serta penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya,dalam memperoleh data penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Angket. Sifat penlitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan yang sama terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum maksimal dengan baik. Dikarnankan beberapa faktor Keterbatasan sumber daya manusia, Kurangnya fasilitas tempat duduk atau tempat berteduhnya saat melakukan pelayanan, kendala jaringan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Kata kunci: Pelayanan, Akta Kematian, Surat Pindag Datang



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Alm Ayahanda Syairuddin dan Ibunda Herlina yang telah memberikan dan pendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimah kasih atas doa restu & ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, MAg. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkfli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sagrjana yang baik.
4. Bapak Firdaus, SH, MH. Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H.,M,H. Sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Darmawan Tia Indrajaya,M.Ag. selaku panesehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dosen dan ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai pada tepat pada waktunya.
9. Kepada abanghanda Ikramiwalidi, S.A.P. Yang telah membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini dan membantu penulis meberikan ide-ide dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada teman-teman Ilmu Hukum C yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Dan teman-teman angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.

12. Kepada teman-teman tim KKN DR-PLUS Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar, Yang telah membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini dan membantu penulis memberikan ide-ide dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,...Juni 2021

FIQRA ASIDIOQI
NIM. 11720714789

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Sejarah Kabupaten Kampar	15
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Administrasi Penduduk	37
B. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik	40
C. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	42
D. Tinjauan Tentang Pelayanan Prima.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 8	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.....	48
B. Apa Faktor Penghambat dalam Pelayanan Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasrakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	11
Tabel II.1	Struktur Organisasi	19
Tabel IV. 1	Informasi tentang pelayanan pembuatan akta kematian dan surat pindah datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar mudah di akses	60
Tabel IV. 2	Petugas memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang dengan sikap yang ramah dan sopan santun	61
Tabel IV. 3	Penyelesaian pelayanan akta kematian dan surat pindah datang di dinas kependuudkan dan pencatatan sipil kabupaten Kampar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.....	62
Tabel IV. 4	Saya merasa nyaman pada saat petugas memberikan pelayanan	62
Tabel IV.5	Blangko pembuatan akta kematian dan surat pindah datang selalu tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	63
Tabel IV. 6	Tidak perlu mengeluarkan banyak waktu untuk mendapatkan pengurusan dalam pembuatan akta kematian dan surat pindah datang	64



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUN

A. Latar Belakang Masalah

Secara klasik, unsur Negara terdiri dari wilayah, rakyat atau bangsa dan pemerintahan yang berdaulat. Secara modern unsur Negara dianggap ada 4 (empat) yaitu wilayah, rakyat, atau bangsa, pemerintah berdaulat dan pengakuan dari Negara lain.¹ Tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam suatu proses terbentuknya Negara, rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara disamping wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari neagara lain. Setiap Negara rakyat, dari rakyat dapat terbentuk penduduk, pengertian penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu Negara dan tunduk pada kekuasaan Negara,² sehingga penduduk harus menempati wilayah dan menetaati peraturan Negara dimana ia tinggal.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah adanya aturan baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada

¹ Budiyanto, *Dasar-dasr Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 19.

² C.S.T. Kansil, (dkk), *Hukum Tata Negara Repbulik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Desentralisasi dirumuskan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan urusan kepada pemerintah daerah dilakukan pada waktu pembentukan daerah otonom yang bersangkutan, baik kepada daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten dan Kota yang dilakukan dan diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom bersangkutan dan disebut kewenangan pangkal. Kewenangan pangkal meliputi beberapa urusan, adapun urusan yang merupakan kewenangan pangkal sebagai berikut : Urusan lingkup pertanian, urusan kesehatan, Urusan pekerjaan umum, Urusan sosial, Urusan pendidikan dasar, dan lain-lain.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan sangat penting dalam

³ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 1

⁴ Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, (Bandung: PT. Alumnus, 2012), h. 18-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kehidupan warga karena menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya. Pelayanan seperti itu tentu sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.⁵

Administrasi kependudukan dalam Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dalam rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembanguna sektor lain. Dokumen Kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sedangkan peristiwa kependudukan dalam Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda kependudukan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat,serta status tinggal datang, perubahan alamat,serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan

⁵ Didik Fatkhur Rohman, Dkk, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 962-971, 962implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tindakan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses. Sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga negara Indonesia, maka perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, dan lain-lain.⁶

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu dalam bentuk barang jasa kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi.⁷

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Administrasi Kependudukan merupakan rangkain kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan penduduk, dan pembangunan sektor lainnya.

Kewajiban Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kamar meliputi:

⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008), h. 136

⁷ Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011), h. 106

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Menyusun program kebijakan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang kependudukan, akta kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama, dan pengakuan anak;
4. Menyusun kebijakan operasional keluarga prasejahtera;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengadilan jumlah penduduk;
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi dinas
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
8. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Di dalam Pasal 6 ayat 1b Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor

- 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa:

“Dinas melaksanakan urusan yang meliputi memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting”.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Namun, di dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kampar masih terdapat beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

permasalahan seperti terjadinya ketidaksamaan pelayanan terhadap masyarakat dan masih ada terjadinya tumpang tindih terhadap pelayanan kepada masyarakat. Misalnya di dalam pengurusan akta kematian masih terdapat kesenjangan antara satu orang dengan yang lainnya. Sesuai dengan observasi penulis masih terdapatnya beberapa masyarakat yang mengalami kesulitan dan mengeluhkan lamanya waktu dalam pembuatan surat tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”**.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, agar pembahasan pada penelitian lebih terarah dan lebih mudah dipahami. Maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini dan difokuskan pada Pelayanan terhadap masyarakat atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting seperti padan pembuatan akta kematian dan surat keterangan pindah datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Karna menurut pendapat penulis masih banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam membuat surat akta kematian dan surat keterangan pindah datang di karnakan pihak dinas yang kurang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelenggaran pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Penyelenggaran Administrasi Kependudukan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa, dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya.⁹ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.2.

⁹ Amiruddin, Zainal Asikin *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 22

¹⁰ *Ibid*, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah tentang belum terlaksananya peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kampar yang terdapat pada pasal 6 ayat 1b.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Kampar, dan Pegawai Dinas Kependudukan Kabupaten Kampar, yang bertempat di Jln. Dr. A. Rahman Saleh, Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Pelayanan yang sama dan propesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting seperti pembuatan akta kematian dan surat pindah dantang.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudain ditarik kesimpulannya.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang terlibat dalam mengurus pelayanan pendaftaran akta kematian dan surat keterangan pindah datang yang berjumlah 754.629 orang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagin penerbit pencatatan akta

¹¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publising, 2015), h.65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kematian berjumlah 1 orang, dan pegawai bagian keterangan pindah datang berjumlah 1 orang.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹² Jumlah sampel yang di ambil pada masyarakat yang melakuka pembuatan akta kematain dan surat keterangan pinda datang berjumlah 30 orang, dan sedangkan jumlah sampel untuk pegawai bagian penerbit pencatatan akta kematian berjumlah 1 orang, dan pegawai bagian keterangan pindah datang berjumlah 1 orang.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responde	Populasi	Sampel	Presentasi
1	Kepala bagian pembuatan akta kematian	1	1	100%
2	Kepala bagian pembuatan surat pinda datang	1	1	100%
3	Masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan akta kematian dan surat ketarangan pindah datang	27,609	60	0,21%

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹² *Ibid*, h 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut data baru yang memiliki sifat up to date.¹³

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lainnya.¹⁴

c. Data Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, jurnal, makalah, dan internet.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap fenomena-fenomena untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan sejenis interview dengan narasumber atau responden untuk menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

¹³ *Ibid*, h 67,68

¹⁴ *Ibid*, h 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angket yaitu Peneliti menggunakan angket yang disebarkan kepada narasumber yang berisikan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh data yang dibutuhkan.

7. Analisis Data

Untuk mengetahui Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi yang dijabarkan secara menyeluruh, dan kemudian data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Dengan metode analisa data ini, peneliti dapat mengetahui mekanisme pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum Kabupaten Kampar dan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan yang meliputi Pelaksanaan Pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan akta kematian dan Penerbitan surat keterangan pidah datang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pelayanan terhadap masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Sejarah Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibukota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksanakan tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai jabatan Bupati yang ke enam ibu kota kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No.12 Tahun 1956. Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar maka Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dengan jumlah Desa 224 dan jumlah Kelurahan 8.

2. Letak Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" bujur timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah selatan Kabupaten Kuantan Singingi
- d. Sebelah barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Kabupaten Kampar di lalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman sungai rata-rata 7,7 M dan lebar rata-rata 143 M. Sungai-sungai besar yang berada di Kabupaten Kampar sebagian masih berfungsi sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber daya energi listrik (PLTA KOTO PANJAG).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21° C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35° C.

3. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

a. Visi

Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya

Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis 2025.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan kedepan.
- 4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustry dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala lokal, regional, nasional maupun internasional
- 5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.
- 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercemrin dalam kerukunan hidup beragama.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar beralamatkan Jl. A. Rahman Shaleh berdiri semenjak awal Tahun 2008 yang bertepatan tanggal 15 Februari 2008, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008. Dengan Kepala Dinas Muslim S.Sos dengan jumlah pegawai 16 orang dan tenaga honorer 21 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

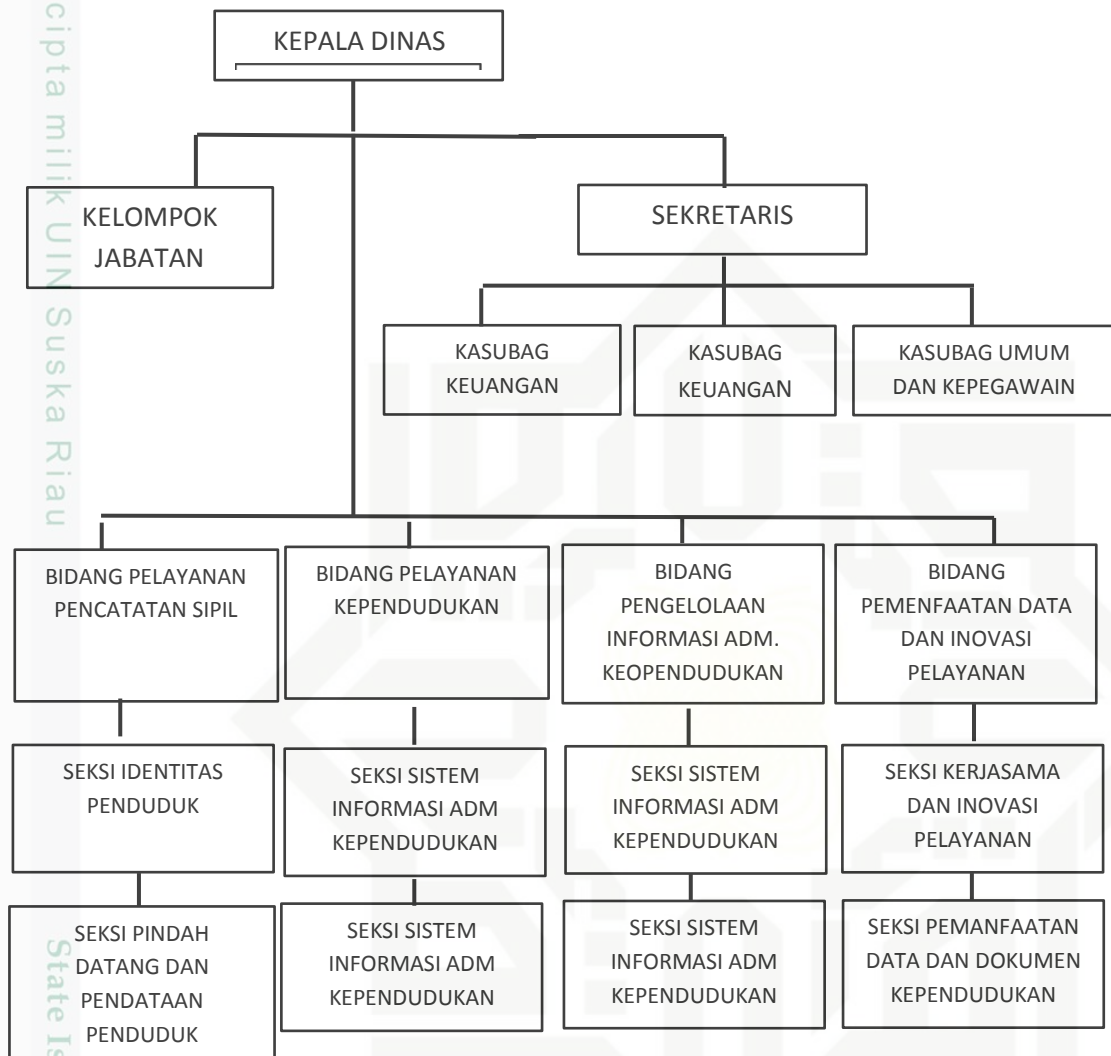
2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, maka sistem yang dianut berbentuk *Line Down Staff*, dimana garis pertanggung jawaban atasan langsung Kepala Sub Dinas dan apabila pimpinan tidak berada ditempat, maka untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar dapat dilihat pada lampiran berikut ini:

Tabel II.1
Struktur Organisasi



3. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kampar

a. Visi

Terwujudnya administrasi kependudukan yang tertip dan pelayanan prima dalam masyarakat yang berbudaya dan agamis tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

- 1) Mewujudkan masyarakat yang sadar, tata tertib administrasi kependudukan
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang profesional.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan dokumen Kependudukan.
- 4) Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait
- 5) Publikasi

4. Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipimpin seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten.

a. Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Dalam melakukan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan program dan anggaran
- 2) Pengelolaan keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara.
- 4) Pengelolaan urusan ASN
- 5) Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- 6) Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data pelayanan administrasi kependudukan.
- 7) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- 8) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.
- 9) Pelaksanaan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
- 10) Pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
- 11) Pembinaan, koordinasi pengendalian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 12) Pelaksanaan kegiatan penata usahaan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi program dan anggaran
- 2) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran
- 3) Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
- 4) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara.
- 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi program, perencanaan, laporan LKjIP. Laporan penja, IKU, Renja dan Renstra.
- 6) Pengelolaan urusan ASN
- 7) Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

- a) Sub bagian perencanaan. Ada pun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - (1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas.
 - (2) Melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan evaluasi penyiapan serta penyajian data dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Melakukan study dan survey/identifikasi kegiatan teknis dan sarana dengan institusi terkait.
 - (4) Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
 - (5) Menghimpun dan mempersiapkan bahan laporan kemajuan fisik dan keuangan secara periodik setiap bulan.
 - (6) Menghimpun dan menyusun bahan laporan tahunan, LAKIP, RENSTRA, RENJA, IKU, dan RPJMD serta APBD-P.
 - (7) Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - (8) Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan program pembangunan.
 - (9) Melaksanakan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan tahunan.
 - (10) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya .
- b) Sub bagian keuangan. Adapun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:
- (1) Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas.
 - (2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bendaharawan dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Membuat konsep Surat Pencaraina Danan (SPD) kegiatan rutin dan bidang-bidang atas dasar permintaan dari rutin dan bidang-bidang/PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (4) Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan.
- (5) Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin.
- (6) Memeriksa (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang.
- (7) Meneliti SPP-LS, SPP-UP, SPP-TU gaji dan tunjangan PNS lainnya yang disampaikan bendaharawan pengeluaran.
- (8) Meneliti/ membuat surat perintah membayar (SPM) yang akan diterbitkan pengguna anggaran.
- (9) Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada bendahara umum Daerah (BUD) dan mencatat SP2D serta membuat laporan bulanan SP2D yang telah diterbitkan.
- (10) Meneliti, mengawasi dan mengurus pelaksanaan pembukaan penerima dan pengeluaran belanja SKDP.
- (11) Mengatur administrasi tata usaha pembukaan, perhitungan anggaran dan pembinaan bendaharawan.
- (12) Meneliti dan menandatangani pengesahan surat pertanggung jawaban (SPJ).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (13) Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan akuntansi SKPD serta membuat jurnal.
- (14) Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayarana gaji, membuat permintaan gaji pokok, rapel honorium.
- (15) Membuat usulan surat keterangan pemberentian (SKPP) gaji bagi pegawai untuk disampaikan kepda bendaharawan umum Daerah (BUD).
- (16) Memenuhi permintaan kenaikan gaji berkala.
- (17) Melakukan wajib pungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (18) Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtasi realisasi anggaran SKPD.
- (19) Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan).
- (20) Melakukan konsultasi dengan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah yang bersifat insidentif dibidang keuangan untuk mendapatkan pedoman menyelesaikan tugas.
- (21) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Sub bagian umum dan kepegawain. Adapun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- (1) Membantu sekretasi menyelenggarakan fungsi: administarsi umum dan kepegawaian.
- (2) Pengelolaan administrasi perlengkapan meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/ pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan rumah tangga dinas.
- (3) Mengatur alur surat masuk dan surat keluar.
- (4) Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor.
- (5) Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya.
- (6) Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan kepegawainan dilingkungan dinas.
- (7) Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkalah dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian.
- (8) Menyusun daftar urutan kepangkatan (DUK) untuk disampaikan pada Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Kampar.
- (9) Menyusun dan mempersiapkan bahan administarsi kepegawain yang meliputi gaji berkalah, kenaikan pangkat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cuti, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, BPJS serta pengusuran pemberian penghargaan.

(10) Merekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan daftar hadir yang ada sebagai bahan laporan pada atasan.

(11) Mengatur administrasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan kedudukan hukum pegawai, bimbingan dan penyuluhan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesaian administrasi kepegawaian.

(12) Menginventarisasi pegawai dan mengusulkan yang akan mengikuti pelatihan penjenjangan dan diklat teknis fungsional serta pendidikan formal.

(13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

(14) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsinya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- 2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- 4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- 5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- 6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendafrtan penduduk.
- 7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:

- 1) Seksi Identitas penduduk. Adapun urain tugasnya sebagai berikut:
 - a) Merencanakan kegiatan pada seksi indentitas penduduk.
 - b) Melakukan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KK dan KTP/KIA) untuk WNI/WNA.
 - c) Melakukan monitoring dan evaluasi identitas kependudukan.
 - d) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
 - e) Melaksanakan tuga-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi pindah datang dan pendaftaran penduduk. Adapun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - a) Merencanakan kegiatan seksi pindah datang dan pendataan penduduk.
 - b) Melakukan tindakan/operasional kependudukan (meneliti kelengkapan administrasi kependudukan) beserta instansi penduduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memproses surat pindah datang.
- d) Menerbitkan penduduk pendatang tanpa dokumen dan penduduk rentan administrasi kependudukan dengan menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas (SKPTI), surat keterangan orang terlantar (SKOT), surat keterangan pencatatan sipil (SKPS) dan surat keterangan tanda komunitas (SKTK).
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi dokumen kependudukan.
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang penduduk tanpa dokumen dan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- g) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang pelayanan pencatatan sipil dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Kepala bidang pelayanan pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil.
- 2) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pelaksanaan pencatatan sipil.
- 5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil.
- 6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil.
- 7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

f. Bidang pelayanan pelayanan pencatatan sipil terdiri dari:

- 1) Seksi kelahiran dan kematian. Adapun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - a) Merencanakan kegiatan pada seksi kelahiran dan kematian.
 - b) Memverifikasi permohonan dan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kematian.
 - c) Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kematian.
 - d) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kelahiran dan kematian.
 - e) Mengarsipkan dokumen administrasi kelahiran dan kematian.
 - f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan. Adapun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - a) Merencanakan kegiatan pada seksi perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menverifikasi permohonan administrasi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- c) Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian, perubahan status anak serta pewarganegaraan.
- d) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- e) Mengarsipkan dokumen administrasi perkawinan dan perceraian, perubahan status anak serta pewarganegaraan.
- f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
- g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

g. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perancangan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

- 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administarsi kependudukan yang meliputi sistem informasi kependudukan, pengelolaan data kependudukan serta tata kelola dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administarsi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknelogi informasi dan komunikasi.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi.
- 5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengolahan informasi administrasi kependudukan.

h. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri dari:

- 1) Seksi Informasi Administrasi Kependudukan. Adapun urain tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana kegiatan seksi informasi administarsi kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menyusun kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan.
 - c) Melaksanakan koordianasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - d) Melaksananan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten.
 - e) Mempersiapkan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan.
 - f) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data informasi dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).
 - g) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
 - h) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi pengelolaan dan penyajian data kependudukan. Adapun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana kegiatan seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan.
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan.
 - c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap administrator Data Base (ADB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Menyiapkan operator dan teknisi sistem pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan.
- e) Menyajikan statistic (data agregat dan profil) kependudukan.
- f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
- g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- 2) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- 4) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- 5) Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan.
- 6) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- 7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari:

- 1) Seksi kerjasama dan inovasi pelayanan. Adapun uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - a) Penyusunan perencanaan kerja seksi kerjasama dan inovasi pelayanan.
 - b) Perumusan kebijakan teknis kerjasama antara instansi dan inovasi pelayanan kependudukan.
 - c) Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kementrian dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dalam urusan pemanfaatan data kependudukan.
 - d) Melaksanakan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - e) Merumuskan kebijakan pengembangan pelayan dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
 - g) Melaksanaka tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Adapun uraian tugas dan fungsinya:
 - a) Penyusunan perencanaan kerja seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
 - b) Perumusan kebijakan teknis seksi pemsnfataan data dan dokumen kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan antara lembaga dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan data kependudukan.
- d) Memberikan pelayanan terhadap lembaga/ instansi/ pihak ketiga memerlukan data kependudukan.
- e) Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan data kependudukan.
- f) Melaksanakan pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- g) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Administrasi Penduduk

Istilah administrasi yang dikenal di Indonesia sebenarnya berasal dari dua istilah yang berbeda. Administrasi berasal dari bahasa latin “administrare” yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi, dan kata lain administration yang berarti pemerintahan. Jadi Ridwan HR, menyimpulkan administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Jadi administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa administrasi mempunyai peranan yang sangat krusial dalam suatu aktivitas sebuah organisasi.

Dalam arti sempit administrasi adalah segala sesuatu bentuk kegiatan tata usaha yang meliputi kegiatan-kegiatan ketatausahaan yang mencakup korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan dan kearsipan. Peran utama administrasi disini adalah sebagai pengelola informasi yang merupakan jantungnya organisasi untuk berkembang. Dalam arti luas administrasi diartikan sebagai proses-proses semua kegiatan secara menyeluruh dalam menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan tersebut didasarkan pada tujuan atau rasional tertentu yang dilakukan oleh dua individu atau lebih dalam mencapai tujuan dengan sarana prasarana yang ada.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta, Edisi Revisi, UII Press, 2016), h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi administrasi diatas, memberikan tiga informasi penting bagi kita bahwa:

1. Administrasi adalah sebuah seni sekaligus proses sebagai seni, administrasi membutuhkan kiat khusus yang sifatnya kondisional dan situasional baik terkait waktu atau tempat.
2. Dalam administrasi terdapat unsur-unsur tertentu, diantaranya:
 - a. Terdapat dua orang atau lebih didalamnya
 - b. Terjadi kerjasama antara orang tersebut yang sifatnya formal dan hirarkis.
 - c. Memiliki tujuan
 - d. Terdapat tugas
 - e. Ketersediaan sarana prasarana.
3. Administrasi muncul secara bersamaan dengan munculnya peradaban manusia dimana administrasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama.¹⁶

Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.¹⁷

Atau kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahannya

¹⁶ Bailah, *Penduduk Pengelolaan Administrasi Desa*, (Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) h 1-2

¹⁷ <http://paralegal.id/penegertian/kependudukan/>, diakses pada tanggal 11 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyangkut politik ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 2, penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.¹⁹

Administrasi penduduk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan, berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan hak sipil penduduk.²⁰ Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tindakan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses. Sehingga menjadi acuan sebagai perumusan

¹⁸ Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, (Bogor, Linda Bestari, 2020), h 2

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Pasal 26 ayat 2, *tentang Penduduk*

²⁰ Peraturan Presiden, Nomor 25 Tahun 2008, *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*

kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

B. Tinjauan tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun oleh pihak swasta pada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang dimiliki.²¹

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Sedangkan pelayanan publik dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki tiga makna:

1. Perihal atau cara melayani
2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang)
3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Donald dalam Hardiyansah (2011) bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak dan pihak lain dan

²¹ Nurcholis Hanif, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, Grasindo, 2007), h.289

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pada hakikatnya tidak berwujud serti tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Bab I Ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.²²

Pelayanan publik cenderung menjadi konsep yang digunakan oleh banyak pihak, baik dari kalangan praktisi maupun ilmuwan, makna yang berbedad-beda. Dalam sejarah perjalanan administrasi publik, pelayanan publik semula dipahami secara sederhana sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.²³

Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan Pemerintah terhadap publik sesuai dengan apa yang publik harapkan, dengan biaya relatif harus lebih rendah, waktu untuk mengerjakan relatif cepat, mutu yang diberikan relatif lebih rendah, waktu untuk mengerjakan relatif cepat, mutu yang diberikan relatif lebih bagus.²⁴

Perbedaan pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik yang menjalankan tugas pokok serta mencari

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, *Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1)*

²³ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2017), h 14

²⁴ Syafii, *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung, PT. Alfabeta, 2003), h.116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dukungan suara, sedangkan pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi mencari keuntungan.

Dari pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah itu sendiri ataupun oleh lembaga non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentu yang telah ditetapkan dengan segala sarana, dan perlengkapannya melalui prosedur kerja tertentu guna memberikan jasa pelayanan dalam bentuk barang dan jasa.

Dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik yang dijadikan oleh pemerintah kepada publik haruslah benar-benar mampu seutuhnya menjadikan sebuah pelayanan publik ini berpihak kepada public. Dengan intinya apa yang harus dibutuhkan oleh publik memang benar-benar dijanjikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang tertulis pada standar pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga pelayanan tersebut dapat terealisasi apa yang diinginkan oleh pemerintah terhadap publik, dan apa yang diinginkan oleh publik dapat terpenuhi.

C. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Chaizi Nasucha mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam prangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.²⁵

Kebijakan publik dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku yang mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R.Dye, penulis buku *Understanding publik policy*, yang dikutip oleh Rian Nugroho D. (2004:3), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat bersama tampil.

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu:

- a. Dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan).
- b. Bagaimana kebijakan publik itu diimplementasikan
- c. Bagaimana kebijakan publik itu dievaluasi.²⁶

Defenisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah

²⁵ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 38.

²⁶ Uddin B. Sore, dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar, CV Sah Media, 2017), h 8-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berorientasi pada kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik itu dibuat untuk dilaksanakan dalam bentuk riil bukan sekedar dinyatakan.

Analisis kebijakan publik merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah tertentu, mengenal masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, menilai dan memprediksi kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik untuk menghadapi masalah yang dihadapi klien tersebut.²⁷

2. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan public dikeluarkan atau dibuat sebenarnya berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan apa yang dikeluarkan. Namun secara garis besar dapat dituliskan sebagai berikut :

- a. Ketertiban
- b. Melindungi hak-hak masyarakat
- c. Ketentraman dan perdamaian
- d. Tujuan bidang tertentu
- e. Kesejahteraan masyarakat.²⁸

D. Tinjauan tentang Pelayanan Prima

Kata pelayanan prima dalam istilah bahasa Inggris yang lazim dipakai dalam keseharian tidak disebut sebagai *primium service*, tetapi istilah yang

²⁷ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang, Bayu Media, 2007), h.4.

²⁸ Gurupkn, <http://gurupkn.com/tujuan-kebijakan-publik>. Diakses pada tanggal 7 April

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dipakai adalah *excellent service* (keunggulan pelayanan, pelayanan dengan mutu yang baik sekali).²⁹

Pelayanan Prima adalah pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁰

Pelayanan yang prima harus dilakukan secara terus-menerus dalam artian pelayanan yang berorientasi kepada pihak publik. Pemerintah yang diamanatkan untuk menjadi birokrasi pemerintah haruslah responsif terhadap apa yang dibutuhkan maupun apa yang menjadi keinginan publik sehingga publik bisa merasa puas apa yang menjadi keinginannya. Secara rinci dapat di kemukakan beberapa kriteria dasar penentuan pelayanan publik yang prima di antaranya adalah:

1. Memiliki tingkat keterjangkauan yang tinggi
2. Memiliki tingkat ketetapan yang tinggi
3. Memberikan jaminan kesopanan sesuai nilai yang berlaku
4. Memberikan kenyamanan kepada pelanggan
5. Menunjukkan kemampuan profesional yang andal
6. Memiliki kredibilitas kepada pelanggan
7. Memiliki garansi yang tinggi
8. Memiliki tingkat efisiensi yang tinggi
9. Memiliki tingkat efektifitas yang tinggi
10. Memiliki fleksibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan

²⁹ Nurma Semil, *Pelayanan Prima Instansi Pemerintahan*, (Jakarta, Kencana, 2018), h 2.

³⁰ Budiono, *Pelayanan prima*, (Jakarta, Gramedia, 2003), h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Memiliki garansi adanya kejujuran
12. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi
13. Memberikan jaminan keamanan yang diperlukan
14. Memiliki kemampuan merespon secara tepat dan cepat.³¹

Sesuai dengan pengertian dan hakekat pelayanan publik yang prima pelayanan publik harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat:

1. Pelayanan Publik yang sederhana

Pelayanan publik yang dikatakan sederhana bila pelayanan tersebut tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan mudah dipahami, tidak berbelit-belit, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan.

2. Pelayanan Publik yang terbuka

Keinginan pelanggan adalah dilayani secara jujur. Oleh karena itu, aparat yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujurnya, apa adanya dalam peraturan atau dalam norma, jangan menaku-nakuti jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan untuk mengharapkan imbalan dari pelanggan. Untuk itu, standar pelayanan harus diumumkan dan disosialisasikan seluas-luasnya atau ditempelkan di loket kantor yang bersangkutan.

3. Pelayanan Publik yang dapat menyajikan secara tepat

Yang dimaksud dengan pelayanan publik dapat menyajikan secara tepat adalah bahwa dalam proses pengelolaan administrasi mengenai

³¹ Ibid, h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan pada Dinas tersebut dengan arahan yang tepat atau tepat sasaran.

4. Pelayanan Publik yang lengkap

Maksud pelayanan publik yang lengkap adalah tersedianya pelayanan yang diinginkan oleh publik di sebuah instansi tersebut sehingga publik tidak harus melakukan pelayanan di Dinas atau Instansi lainnya.

5. Pelayanan Publik yang wajar

Tertama uang distribusinya harus dapat dijangkau oleh masyarakat atau publik yang melakukan pelayanan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, belum maksimal dengan baik. Karna masih terdapat pelayanan pendaftaran penduduk yang belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimal dalam fasilitas umum seperti tempat duduk dan tempat berteduh, jaringan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masih ada masyarakat malas berurusan dengan petugas administrasi dan masih ada menggunakan jasa calo. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memaksimalkan kinerja dari pegawai atau petugas lainnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka sarana yang dapat diberikan terkait pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam pengurusan dan penerbitan Akta Kematian dan Surat Keterangan Pindah Datang, yakni

1. Agar memberikan pelatihan kepada pegawai atau petugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar khususnya dibidang pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil guna meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) agar peluang kesadaran dan pengetahuan dari berbagi pihak untuk mendukung pelaksanaan administrasi kependudukan terutama dalam pembuatan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti Akta Kematian dan Surat Keterangan Pindah Datang. Dan harus adanya kesadaran Pemerintah Daerah dalam memperhatikan permasalahan pada fasilitas dan anggaran.
2. Diharapkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar meningkatkan fasilitas yang ada, perbaikan masalah jaringan, dan memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara langsung mengenai proses dan penerbitan dokumen kependudukan serta menegaskan kepada masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo saat pembuatan dokumen kependudukan. Dan diharapkan juga kepada masyarakat kabupaten Kampar mampu bersikap kooperatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Bailah. 2019. *Penduduk Pengelolaan Administrasi Desa*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bidarti, Agustina. 2020. *Teori Kependudukan*. Bogor: Linda Bestari.
- Budiono. 2003. *Pelayanan prima*. Jakarta: Gramedia.
- Budiyanto. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2017. *Menejemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
- Edy Sutrisno. 2009. *Menejemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Kansil, C.S.T, (dkk). 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Napitupulu, Paimin. 2012. *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*. Bandung: PT. Alumnus.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Semil, Nurma Semil. 2018. *Pelayanan Prima Instansi Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publisng.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sore, Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar: CV Sah Media.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i. 2003. *Metode Penelitian Adminitrasi*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Pasal 26 ayat 2 tentang Penduduk
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Website

- Guruppkn. <http://guruppkn.com/tujuan-kebijakan-publik>. Diakses pada tanggal 7 April 2021.
- http://books.google.co.id/books?id=H_9UDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=jurnal+kualitas+pelayanan+prima&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021.
- <http://paralegal.id/penegertian/kependudukan/>. diakses pada tanggal 11 April 2021.
- <http://amp.kompas.com/skola/read/2020/02/01/140000269/sosialisasi-pengertian-proses-fungsi-dan-tujuannya>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta:UGM Press. *Jurnal Online Mahasiswa UGM*. Vol 18 spa PP.

Didik Fatkhur Rohman, Dkk. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1 (5).

Wika Difa Kartika. 2019. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Terpencil(KAT) Desa Talang Perigi Kecamatan Rakti Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Pekanbaru : Universitas Riau. *Jurnal Online Mahasiswa UR*. Vol 6 (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



GAMBAR I: Wawancara Dengan Bapak Asril, Selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



GAMBAR II : Wawancara Dengan Ibuk Isda Mora, Kepala Seksi Pindah Datang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP MASYRAKAT OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN" yang ditulis oleh:

Nama : FIQRA ASIDIQI
 NIM : 11720714789
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada:
 Hari / Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permmtaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021
 TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Dr. H. Eрман, M.Ag

Sekretaris
 Musrifah, SH., MH

Penguji I
 Lovelly Dwina Dahren, SH., MH

Penguji II
 H. MHD. Kastulani, SH, MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan
 Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

Jahius, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3498/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 April 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FIQRA ASIDIQIQI
NIM : 11720714789
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN PELAYANAN YANG SAMA TERHADAP MASYARAKAT OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KAMPAR.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40924
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3498/2021 Tanggal 20 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

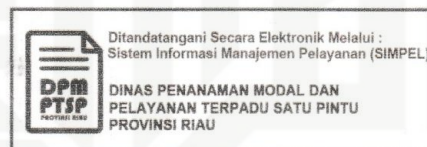
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FIQRA ASIDIQI |
| 2. NIM / KTP | : | 11720714789 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PELAYANAN YANG SAMA TERHADAP MASYARAKAT OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/407

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/40924 tanggal 21 April 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : FIQRA ASIDIQQI |
| 2. NIM | : 11720714789 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PELAYANAN YANG SAMA TERHADAP MASYARAKAT OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

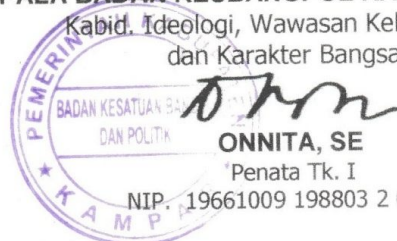
1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 6 Juni 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Dr. A. Rahman Saleh No. 07 Call Center 0821 7104 4422

BANGKINANG

Email : disdukcapil@kamparkab.go.id Website : www.disdukcapil.kampar.go.id

Kode Pos 28411

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 800/DKPS-SET/166

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FIQRA ASIDIQQI
NIM : 11720714789
Universitas : Universitas Islam Negeri SUSKA Riau
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Alamat : Jl. HR. Soebrantas Panam Km 15 No 155 Tuah Madani
Kec. Tampan Kabupaten Kampar Riau.

benar telah melakukan Penelitian/ Riset dan pengambilan data untuk keperluan penulisan tesis dengan judul “ **PELAKSANAAN PELAYANAN YANG SAMA TERHADAP MASYARAKAT OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KAMPAR**”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkinang, 9 Juni 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAMPAR



MUSLIM, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19670702 199002 1 001



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrandas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : FIQRA ASIDIQQI

NIM : 11720714789

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pembimbing: H. Mohd. Kastulani, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



FIQRA ASIDIQQI , dilahirkan di Koto Tuo pada tanggal 25 Mei 1999, Anak ke dua dari dua bersaudara merupakan putra dari pasangan Syairudin (Alm) dan Herlina, saat ini penulis tinggal di jalan Garuda Sakti Km 1 Gg Melayu Perumahan Villa Garuda Kencana. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 012 Koto Tuo Barat tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Koto Tuo tamat pada tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang tamat pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang setelah itu melakukan Kulia Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Pada tanggal 06 Agustus 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”